

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA BELANJA DAERAH DI UPT BALAI LATIHAN KERJA DELI SERDANG

Fitri Yani Panggabean

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Oktarini Khamilah Siregar

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abdul Aziz Suendar Nasution

Alumni Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

This study aims to determine how much the level of expenditure and the level of efficiency used by Deli Serdang Technical Implementation Unit in 2015-2017. The research method uses descriptive research. The type of data used is qualitative data. The data source of this research is the target and the realization of APBN funds in the year 2015-2017 obtained from the Deli Serdang Technical Training Center. This study uses descriptive data analysis techniques that begin by collecting information through interviews, data reduction, data presentation and at the end of making by concluding. The place of research was carried out at the Deli Serdang Technical Training Center. The study period starts from January 2019 until completion. The data of this study are secondary data. The analysis shows the level of efficiency seen in 2015 that is 86.57% and in 2016 decreased by 88.69% then in 2017 decreased by 89.25% seen from the percentage level shows the criteria are quite efficient by increasing the percentage level shows increasingly efficient. And the level of importance shows that it has been effectively seen in 2015 by 97.22% and in 2016 decreased by 93.50% then in 2017 it increased by 97.31% seen from the percentage level indicating the effective criteria. Because the greater the percentage shows more effective.

Keywords: *Efficiency, Effectiveness, Utilization of Regional Expenditure Funds*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya kewenangan dalam pemerintahan maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu seharusnya dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu melaksanakan perannya semakin besar mengingat cara efektif, efisien dan akuntabel. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku didalamnya. Guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Balai Latihan Kerja Deli Serdang merupakan lembaga pelatihan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengembangan pelatihan yang bertujuan untuk membekali keterampilan bagi pencari kerja yang khususnya masyarakat Deli Serdang yang putus sekolah. Sumber dana untuk penyelenggaraan program pelatihan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan dasar hukum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang
Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Paket	Anggaran	Realisasi	Persentase %
2015	12 Paket	796.400.000	774.280.000	97,22 %
2016	14 Paket	898.600.000	840.200.000	93,50 %
2017	11 Paket	783.263.000	762.200.000	97,31 %

Sumber : UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang, 2019

Tabel 1.1 menunjukkan anggaran dan realisasi belanja UPT BLK Deli Serdang pada 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan di tiap tahunnya, pada tahun 2015 realisasi belanja lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja yaitu 97,22%, selanjutnya ditahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 93,50% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 97,31%. Anggaran dan realisasi belanja UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang dilihat dari tingkat persentase sudah terealisasi secara optimal. Tetapi instruktur UPT BLK, Suhaimi mengatakan bahwa sebenarnya jumlah paket dan anggaran yang diberikan pemerintah kepada BLK Deli Serdang sangat besar, tetapi BLK tidak mampu menjalankannya karena minimnya tenaga instruktur dan peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan pelatihan sudah tidak sesuai untuk melakukan kegiatan pelatihan. Oleh karena itu BLK melakukan revisi karena tidak mampu menjalankannya. jadi paket-paket yang diberikan kepada BLK Deli Serdang diberikan kepada BLK yang lain yang membutuhkan.

Permasalahan minimnya jumlah tenaga pelatih atau instruktur bukan hanya dirasakan balai latihan kerja deli serdang. tetapi total 303 BLK yang ada di seluruh indonesia, masih membutuhkan sekitar 5.000 instruktur menurut Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, kata Bambang Satrio Lelono (www.Merdeka.com). Minimnya tenaga instruktur juga dirasakan oleh UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang. Instruktur UPT BLK, Suhaimi mengatakan bahwa lembaga pelatihan ini sudah mulai kesulitan mendapatkan tenaga instruktur. Selama ini, BLK Mengandalkan para instruktur yang usianya yang hampir mendekati pensiun.

Banyaknya tenaga instruktur yang akan pensiun dalam waktu dekat, namun belum ada penggantinya. “Instruktur di BLK ini jumlahnya sedikit, hanya sekitar empat orang. Ada beberapa orang yang akan pensiun, dan tentu ini menyulitkan kami dalam memberikan pelatihan para tenaga kerja. Apalagi mencetak instruktur itu sangat berat karena harus dari awal” katanya. Bukan hanya permasalahan instruktur saja yang terjadi di Balai Latihan Kerja Deli Serdang tetapi juga permasalahan dalam peralatan. Peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan pelatihan juga sudah tidak sesuai untuk melakukan kegiatan pelatihan. Padahal adanya Balai Latihan Kerja diharapkan dapat menjadi pusat pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan keahlian para pencari kerja sebelum terjun ke dunia usaha. Berdasarkan uraian latar belakang perlu kiranya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Belanja Daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Balai Latihan Kerja

Menurut Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Balai latihan kerja mengajarkan keterampilan tertentu, seperti : mekanik, komputer tata busana, pekebunan, tata boga, pertukangan, otomotif dan masih banyak lagi tergantung daerah masing-masing.

Kebutuhan pasar kerja, kualifikasi lapangan kerja membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Karenanya tidak hanya dibutuhkan pendidikan formal saja, tetapi juga melalui pelatihan kerja dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang potensial dan produktif.

Dari definisi atau pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja adalah suatu kegiatan, tindakan, upaya yang dilakukan secara berencana dalam bimbingan tenaga profesional kepelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang terampil, kreatif, profesional, dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya.

2.1.2 Tujuan Pelatihan

Tujuan utama dari pelaksanaan pelatihan kerja adalah peningkatan kompetensi atau keterampilan kerja. Tujuan pelatihan yaitu : meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan meningkatkan daya saing.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelatihan

Menurut Rivai (2014) dalam melakukan “pelatihan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu instruktur, peserta, materi (bahan), metode, tujuan pelatihan, dan lingkungan yang menunjang. Metode pelatihan terbaik tergantung dari berbagai faktor”. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan yaitu : *Cost-Effectiveness* atau Efektivitas biaya, materi program yang dibutuhkan, prinsip-prinsip pembelajaran, ketepatan dan kesesuaian fasilitas, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan dan kemampuan serta preferensi instruktur pelatihan.

2.1.4 Indikator Pelatihan

Dalam mengukur variabel pelatihan, penelitian mengadaptasi indikator yang digunakan dalam penelitian peserta pelatihan Dessler (2015), pelatihan dibagi menjadi 5 indikator yaitu : Instruktur, peserta pelatihan, Metode, Materi dan Tujuan pelatihan.

2.1.5 Penganggaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 tahun 2007 pasal 1 butir 8. “Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana”.

Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terselenggaranya penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Sistem penganggaran merupakan instrumen birokrasi pada suatu organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada kedalam anggota organisasi. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan publik yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat penengendalian.

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu : Pendekatan tradisional dan Pendekatan *new public management* (Pendekatan kinerja, Pendekatan penganggaran program,

Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*planning, programming and budgeting system-PPBS*), dan Pendekatan anggaran berbasis nol (*zero based budgeting-ZBB*)).

2.1.6 Anggaran

Menurut pendapat Bastian (2010:191) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik anggaran dapat diinterpretasikan sebagai: “Paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang”. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun Nomor 71 tahun 2010 : “Anggaran merupakan pedoman tingkatan yang akan akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, uang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”.

Secara teoritis, “anggaran merupakan merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi” (Mardiasmo, 2009). Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategis. Begitu juga dalam organisasi sektor publik, anggaran menjadi rencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, yaitu penyediaan pelayanan publik yang prima.

a. Fungsi Anggaran

Anggaran sektor publik seperti diungkapkan Mardiasmo (2009), mempunyai beberapa fungsi utama yaitu : Anggaran Sebagai Alat Perencanaan, Anggaran Sebagai Alat Pengendalian, Anggaran Sebagai Alat kebijakan Fiskal, Anggaran Sebagai Alat Politik, Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi, Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja, Anggaran Sebagai Alat motivasi dan Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

b. Tujuan dan Karakteristik Anggaran

Anggaran bagi sektor publik adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan organisasi, penganggaran mutlak diperlukan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

maka anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan.
- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang.
- 3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- 4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- 5) Anggaran yang telah disusun hanya dapat di ubah dalam kondisi tertentu.

c. Prinsip-Prinsip Anggaran

Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik dan/atau pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip tersebut, adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009) yaitu : Otorisasi oleh legislatif, Komprehensif/menyeluruh, Keutuhan anggaran, *Nondiscretionary appropriation*, Periodik, Akurat, Jelas dan Transparan.

2.1.7 Manfaat Realisasi Anggaran

Manfaat informasi Laporan realisasi anggaran yaitu :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

- 2) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2.1.8 Belanja

a. Pengertian Belanja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut : “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Belanja menurut kelompok belanja

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Kelompok belanja terdiri dari: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu: belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung yaitu : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

2.1.9 Efisiensi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009) “Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas”. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi anggaran menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi (misalnya : staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efisiensi Anggaran

Menurut kaho (1997) dalam Dima (2013) dalam Reza (2015) menyatakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran yaitu : faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggara otonomi daerah, faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah, faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah, faktor organisasi dan manajemen sebagai sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah. Dan syarat Tercapainya Efisiensi adalah berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, pembagian kerja yang nyata, rasionalisasi wewenang dan tanggung jawab wewenang, dan prosedur kerja yang praktis. Tingkat efisiensi diukur dengan cara ‘membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja’ (Mahsun,2009).

Adapun rumus perhitungan efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Nilai Efisiensi

Persentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemenkeu No 214/PMK.02

2.1.10 Efektivitas Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009) “efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna)”. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Anggaran.

Dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa faktor yang terdapat mempengaruhi efektivitas anggaran (Reza, 2015) ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas, faktor-faktor tersebut ialah :

1) Partisipasi dalam penyusunan anggaran.

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran meliputi dua jenis pendekatan yaitu :

a) Pendekatan *Top Down* yaitu pendekatan anggaran yang disusun atasan atau manajemen puncak untuk bawahannya. Pendekatan ini mempunyai kelemahan, yaitu komitmen yang kurang bagi manajer dan karyawan yang melaksanakan anggaran.

b) Pendekatan *Bottom Up* yaitu pendekatan yang disusun oleh bawahan atau manajemen level bawah dan selanjutnya diserahkan kepada manajemen atas. Pendekatan ini mempunyai kelemahan yaitu, seringkali tidak memperhatikan keselarasan tujuan, kurang terkendali dan tujuan yang ingin dicapai terlalu mudah.

2) Tingkat kesulitan anggaran.

Anggaran yang ideal adalah anggaran yang sulit, yaitu anggaran yang tidak terlalu mudah dicapai. Namun anggaran tersebut memungkinkan untuk dicapai, sehingga terdapat sikap optimistik dalam melaksanakan anggaran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa harus menyusun anggaran yang dapat dicapai yaitu :

a). Mengusahakan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

b). Untuk mengurangi usaha memanipulasi data.

- c). Untuk meyakinkan pihak eksternal bahwa informasi keuangan dapat dipercaya.
- d). Menunjukkan operasi perusahaan yang realistis.
- e). Menimbulkan suasana kemenangan dan perilaku positif dalam perusahaan.
- 3) Keterlibatan manajemen puncak
Keterlibatan manajemen puncak diperlukan agar sistem anggaran dapat efektif memotivasi para pelaksana. Manajemen puncak harus berpartisipasi dalam meninjau dan mengesahkan anggaran, jadi tidak sekedar memberikan stempel pengesahan. Selain itu manajemen puncak juga harus mengikuti hasil-hasil pelaksanaan anggaran. Sehingga memberikan umpan balik yang efektif dalam memotivasi para pelaksana. Keterlibatan manajemen puncak sebagai fungsi kontrol terhadap anggaran yang disusun oleh manajemen level bawah.
- 4) Peran departemen anggaran
Departemen anggaran berkewajiban untuk menganalisis anggaran secara rinci dan harus yakin bahwa anggaran disusun dengan benar dan informasi yang terkandung tepat. Agar kewajiban tersebut tercapai, departemen harus dapat menjaga keseimbangan antara membantu manajemen lini dan memastikan integritas sistem anggaran.
- 5) Laporan yang akurat dan tepat waktu
Laporan yang tidak akurat berakibat tidak dapat dengan tepat menunjukkan penyimpangan yang terjadi, sedangkan laporan yang terlambat berakibat penyimpangan yang besar terlambat diketahui, sehingga perbaikan sulit dilakukan. Laporan anggaran yang akurat dan tepat waktu dapat digunakan sebagai peringatan dini bagi para pelaksana. Agar laporan akurat dan tepat waktu, maka penyusunan anggaran harus memiliki integritas dan keahlian. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.
- b. Adapun ukuran efektivitas sebagai berikut :
- 1). Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran.
 - 2). Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
 - 3). Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
 - 4). Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intensitas sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara “membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja” (Mahsun, 2009).

Adapun rumus perhitungan efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

Tabel 2.2 Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif

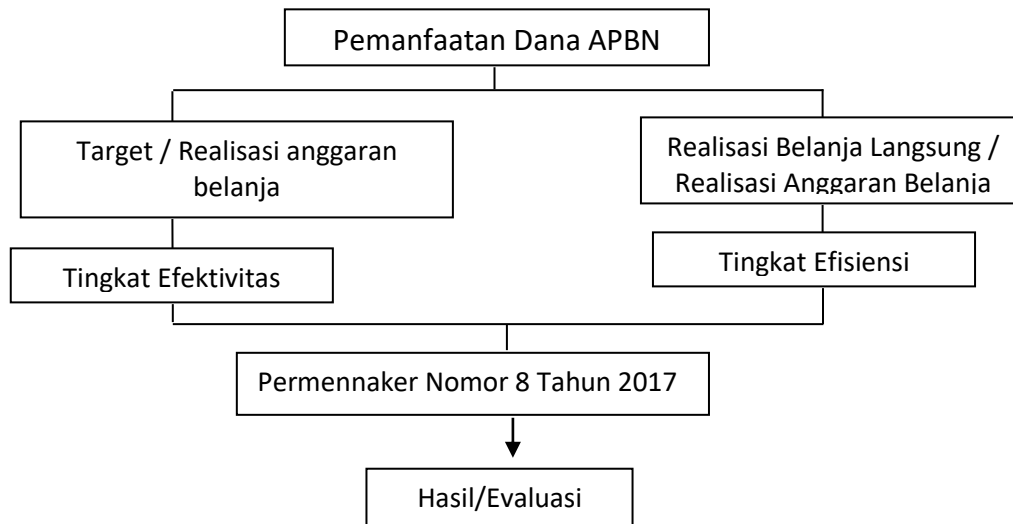
<60%

Tidak Efektif

Sumber: Kemenkeu No 214/PMK.02

2.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan terdahulu, maka dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memberikan uraian mengenai hasil pengukuran pemanfaatan dana APBN pada UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang. “Penelitian deskriptif merupakan metode yang memungkinkan peneliti untuk dapat memahami objek penelitian seluas-luasnya” (Hidayatsyah, 2010).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013), yang mengungkapkan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan prioritas utama yang memiliki nilai strategis dalam penelitian, hal ini diungkapkan lantaran tujuan penelitian ialah mendapatkan data-data, baik primer, ataupun data sekunder”. Sehubungan dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

- 1) Dilakukan melalui studi pustaka, yakni jurnal atau artikel akuntansi, peraturan-peraturan pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Melalui dokumentasi, yaitu sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.
- 3) Wawancara yaitu dilakukan dengan cara menentukan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan yang di wawancara tentang segala sesuatu yang di ketahui oleh pewawancara (Suhaimi, Amd).

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut teori Miles dan Huberman didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan antara lain :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan dilapangan selama meneliti, tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan.
3. Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagian yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Perhitungan Efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja langsung UPT BLK Deli Serdang dengan realisasi anggaran belanja UPT BLK deli Serdang. Koefisien efektivitas merupakan hasil rasio antara realisasi belanja langsung BLK Deli Serdang dengan realisasi anggaran belanja BLK Deli Serdang yang telah ditentukan.

Hasil perhitungan efisiensi pemanfaatan dana belanja daerah UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

- a. Efektivitas pemanfaatan dana belanja daerah tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{796.400.000}{774.280.000} \times 100\% = 97,22\%$$

Tingkat efektif dapat dilihat dengan hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektivitas <60% maka dinilai tidak efektif. Jika rasio efektivitas antara 60%-80% maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektivitas antara 80%-90% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektivitas antara 90-100% maka dinilai efektif, jika rasio efisien >100% maka dinilai sangat efektif. Dari perhitungan rasio diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2015 sebesar 97,22% dapat dikategorikan efektif .

- b. Efektivitas pemanfaatan dana belanja daerah tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{898.600.000}{840.200.000} \times 100\% = 93,50\%$$

Tingkat efektif dapat dilihat dengan hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektivitas <60% maka dinilai tidak efektif. Jika rasio efektivitas antara 60%-80% maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektivitas antara 80%-90% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektivitas antara 90-100% maka dinilai efektif, jika rasio efisien >100% maka dinilai sangat efektif. Dari perhitungan rasio diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2016 sebesar 93,50% dapat dikategorikan efektif .

- c. Efektivitas pemanfaatan dana belanja daerah tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{783.263.000}{762.200.000} \times 100\% = 97,31\%$$

Tingkat efektif dapat dilihat dengan hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektivitas <60% maka dinilai tidak efektif. Jika rasio efektivitas antara 60%-80% maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektivitas antara 80%-90% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektivitas antara 90-100% maka dinilai efektif, jika rasio efisien >100% maka dinilai sangat efektif. Dari perhitungan rasio diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2017 sebesar 97,31% dapat dikategorikan efektif .

B. PEMBAHASAN

1. EFISIENSI PEMANFAATAN BELANJA DAERAH DI UPT BALAI LATIHAN KERJA DELI SERDANG

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai suatu hasil dan tujuan sesuai yang diharapkan dengan menghemat penggunaan sumber daya dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang percuma (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja sebagaimana yang dimaksud balai latihan kerja disingkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Faktor utama dalam melakukan pelatihan kerja adalah sarana prasarana yang memadai sehingga berjalannya proses pelatihan. serta instruktur yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Adapun permasalahan yang terjadi di balai latihan kerja deli serdang ialah minimnya tenaga pelatih atau instruktur serta peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan pelatihan sudah tidak sesuai sehingga mengakibatkan proses kegiatan pelatihan yang dicapai kurang optimal.

Menurut wawancara dari Bapak Suhaimi A.Md selaku instruktur balai latihan kerja deli serdang permasalahan sudah terjadi beberapa tahun belakang. jadi untuk berjalannya kegiatan pelatihan ini, Balai Latihan Kerja Deli Serdang bekerjasama dengan Instruktur Lembaga Pelatihan Kursus Swasta (LPSK).

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efisiensi Anggaran

Menurut kaho (1997) dalam Dima (2013) dalam Reza (2015) menyatakan ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran:

- 1). Faktor kualitas SDM sebagai pelaku dalam penyelenggara otonomi daerah.
- 2). Faktor keuangan sebagai tulang punggung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah.
- 3). Faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah.
- 4). Faktor organisasi dan manajemen sebagai sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah.

Kinerja pemerintah dapat dikategorikan efisien dapat dilihat dengan hasil perhitungan rasio. Jika rasio efisien >100% maka dinilai tidak efisien. jika rasio efisien antara 90%-100% maka dinilai kurang efisien, jika rasio efisien antara 80%-90% maka dinilai cukup efisien, jika rasio efisien antara 60%-80% maka dinilai efisien, jika rasio efisien <60% maka dinilai sangat efisien. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah semakin baik. Analisis efisiensi pemanfaatan dana belanja daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang memiliki kriteria yang cukup efisien selama tahun 2015 sampai 2017.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan tingkat efisiensi terlihat balai latihan kerja Kabupaten Deli Serdang telah melakukan efisiensi, walaupun tingkat efisiensi yang dilakukan belum maksimal. Dapat dilihat dari tingkat efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. pada tahun 2015 sebesar 86,57% (cukup efisien) selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 88,69% (cukup efisien) kemudian pada tahun 2017 sebesar 89,25% (cukup efisien).

2. EFEKTIVITAS PEMANFAATAN BELANJA DAERAH DI UPT BALAI LATIHAN KERJA DELI SERDANG

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi atau pemerintah mencapai tujuan atau targetnya” (Mardiasmo,2009). Adapun ukuran efektivitas Sebagai berikut :

- 1). Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan dengan keluaran.
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Kinerja pemerintah dapat dikategorikan efektif dapat dilihat dengan hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektivitas <60% maka dinilai tidak efektif. jika rasio efektivitas antara 60%-80% maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektivitas antara 80%-90% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektivitas antara 90%-100% maka dinilai efektif, jika rasio efektivitas >100% maka dinilai sangat efektif. Semakin besar rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah semakin baik. Analisis tingkat efektivitas pemanfaatan dana belanja daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang memiliki kriteria yang efektif selama tahun 2015 sampai 2017.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan tingkat efektivitas terlihat balai latihan kerja Kabupaten Deli Serdang telah melakukan efektivitas yang sudah bagus. Dapat dilihat dari tingkat efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan target anggaran dengan realisasi anggaran belanja. pada tahun 2015 sebesar 97,22% (efektif) selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 93,50% (efektif) kemudian pada tahun 2017 sebesar 97,31% (efektif).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Belanja Daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Dana Belanja Daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang selama periode 2015 sampai 2017 sudah cukup efisien tetapi belum optimal. Tetapi secara keseluruhan tingkat efisiensinya tidak berfluktuasi yang signifikan terlihat dari tahun 2015 tingkat efisiensinya sebesar 86,57% selanjutnya pada tahun 2016 tingkat efisiensinya sebesar 88,69% kemudian pada tahun 2017 tingkat efisiensinya sebesar 89,25%. Maka dapat ditarik kesimpulan tingkat efisiensi pemanfaatan dana Belanja Daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang dapat dikatakan stabil tetapi kurang optimal.
2. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Dana Belanja Daerah di UPT Balai latihan Kerja Deli Serdang selama periode 2015 sampai 2017 sudah bagus. Dapat dilihat dari tingkat efektivitasnya pada tahun 2015 sebesar 97,22% selanjutnya tingkat efektivitas pada tahun 2016 menurun sebesar 93,50% dan kemudian pada tahun 2017 sebesar meningkat 97,31%. Maka dapat ditarik kesimpulan tingkat efektivitas pemanfaatan dana belanja daerah di UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang dapat dikatakan efektif dan optimal. Walaupun terbatasnya tenaga pelatih atau instruktur dan peralatan-peralatan yang melakukan kegiatan pelatihan sudah usang Balai Latihan Kerja Deli Serdang dapat melakukan kinerja yang baik. Balai latihan kerja melakukan kerjasama dengan Instruktur Lembaga Pelatihan Kursus Swasta (LPKS) agar berjalan dan terlaksananya kegiatan pelatihan yang dilakukan Balai Latihan Kerja Deli Serdang.

5.2 Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. UPT Balai Latihan Kerja Deli Serdang untuk menambah tenaga pelatih atau instruktur dimana tenaga pelatih yang ada hanya ada dua (2) orang saja, apalagi sudah ada yang memasuki masa pensiun.
2. UPT Balai Latihan kerja deli Serdang untuk menambah peralatan atau alat untuk melakukan kegiatan pelatihan agar proses kegiatan pelatihan berjalan dengan nyaman dan lancar.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kepada sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* Edisi Ketiga, Jakarta : Erlangga.
- Dessler, Gary. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayatsyah, 2010, *Penelitian Deskriptif*. Jakarta : Rajawali.
- Mahsun, Mohammad, 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : BPF.
- Mardisamo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : ANDI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 butir 8 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja.*
- Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Reza, M., & Fahlevi, H., 2015, *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh*, JIAP Vol. 1, No. 2, 2015.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Veithzal Rivai. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Edisi ke 6*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Pusdiklakwas.bkp.go.id*
<https://www.merdeka.com/uang/kemnaker-butuh-5000-instruktur-untuk-balai-latihan-kerja.html>